

Materi Rangkuman ini dapat dikutip untuk publikasi atau keperluan lainnya dengan mencantumkan keterangan sumber "The Indonesian Forum yang diselenggarakan oleh The Indonesian Institute"

- TEMA** : The Indonesian Forum (TIF) Seri ke-137: Dua Tahun Prabowo–Gibran: Ke Mana Arah Indonesia?"
- Pemateri** :
1. Jaleswari Pramodhawardani (Kepala LAB45)
 2. Yanuar Nugroho (Dosen Sekolah Tinggi Filsafat Driyarkara)
 3. Putu Rusta Adijaya (Peneliti Bidang Ekonomi, The Indonesian Institute)
- Moderator** : Felia Primaresti - Manajer Riset, The Indonesian Institute
- Partisipan** : Diskusi ini diikuti oleh peserta dengan berbagai latar belakang yang berbeda, seperti pemerintah, media, NGO, dan masyarakat umum lainnya.

PEMBAHASAN

Sesi dibuka oleh Felia Primaresti selaku moderator. Felia memperkenalkan The Indonesian Forum Seri 137 sebagai edisi khusus untuk menyebarluaskan laporan sintesis evaluasi dua tahun pemerintahan Prabowo-Gibran. Sambutan disampaikan oleh Adinda Tenriangke Muchtar, Direktur Eksekutif The Indonesian Institute (TII). Adinda menyebut dua tahun pemerintahan ini sebagai masa yang suram, ditandai bencana di berbagai daerah, tekanan ekonomi, dan kemunduran demokrasi. Ia menegaskan bahwa kolaborasi menjadi kunci dalam memperbaiki tata kelola. Laporan sintesis disusun dari tulisan-tulisan kajian TII sebelumnya, dengan sorotan pada proses kebijakan yang terpusat dan tidak partisipatif serta pemangkasan transfer ke daerah. Ia berharap masukan para peserta dapat menjadi bahan perbaikan bagi TII ke depan.

Putu Rusta Adijaya, Peneliti Bidang Ekonomi TII, kemudian memaparkan profil TII dan mempresentasikan laporan sintesis yang mencakup empat bidang: ekonomi, politik, sosial, dan hukum. **Di bidang ekonomi**, laporan menyoroti ketimpangan kesiapan iklim antarprovinsi, komitmen iklim yang belum sejalan dengan praktik, kebakaran hutan dan lahan (karhutla) yang naik tajam pada 2026, serta pemangkasan Transfer ke Daerah (TKD) dari Rp807,9 triliun pada 2025 menjadi Rp661,7 triliun pada 2026 yang diprotes 15 kepala daerah. **Di bidang politik**, laporan menyoroti proses kebijakan yang sentralistik dengan partisipasi yang cenderung prosedural, menyempitnya kebebasan akademik, serta komunikasi publik pemerintah yang defensif. **Di bidang sosial**, laporan menyoroti tata kelola program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang ditandai puluhan ribu korban keracunan dan dampak gizi yang belum terukur, serta penonaktifan jutaan peserta Penerima Bantuan Iuran (PBI) Jaminan Kesehatan Nasional (JKN). **Di bidang hukum**, laporan menyoroti meningkatnya pelanggaran kebebasan berekspresi dan insiden keamanan digital, tingginya aduan terhadap Polri ke Komnas HAM, serta serangan terhadap pembela HAM. Rusta juga merekomendasikan penguatan koordinasi antaraktor pemerintah pusat, perlindungan hukum yang lebih kuat bagi pembela HAM, partisipasi publik yang lebih bermakna dalam perumusan kebijakan, dan standar komunikasi publik yang lebih baik bagi lembaga pemerintah.

Jaleswari Pramodhawardani menanggapi dengan menyoroti perluasan peran militer dan kepolisian. Ia menyampaikan kekhawatiran tentang kontrol sipil dan kecenderungan militerisme dalam program kesejahteraan. Menurutnya, pemerintah tidak pernah menjelaskan secara gamblang ancaman pertahanan yang hendak diatasi, sehingga perluasan peran aparat tidak memiliki dasar penilaian ancaman yang transparan. Jaleswari juga menyoroti persoalan proporsionalitas dan akuntabilitas dalam respons aparat keamanan terhadap kritik. Terkait ruang digital, ia mencatat bahwa sebagian besar kasus pelanggaran kebebasan berekspresi lebih bernuansa politis daripada kejahatan siber, dan bahwa kekerasan berbasis gender online (KBGO) merupakan persoalan besar yang kerap terabaikan, dengan perempuan sebagai mayoritas korban, sekitar dua pertiga.

Jaleswari mengkhawatirkan bahwa jika militerisme menguat, penerima program kesejahteraan berisiko terbungkam saat mengadukan dan melaporkan penyelewengan dalam pelaksanaan program sosial. Perempuan pembela HAM dan jurnalis juga berisiko tidak aman karena pola pengaduan kasus kekerasan yang belum inklusif. Ia kemudian menegaskan dua rekomendasi: memastikan moratorium satuan teritorial baru, termasuk penambahan batalion teritorial, serta memastikan mekanisme pengaduan independen agar tindak lanjut dapat dilakukan secara transparan dan diawasi oleh DPR dan publik.

Yanuar Nugroho menyampaikan bahwa pola kebijakan pemerintah memang semakin tersentralisasi, tetapi enggan menerima koreksi dan aspirasi. Ia menilai terjadi pergeseran prioritas pembangunan dari fokus infrastruktur pada era sebelumnya ke penekanan pada program sosial dan pembangunan sumber daya manusia, dengan resentralisasi sebagai perubahan terbesar. Contohnya adalah program MBG dan Koperasi Desa Merah Putih yang dirancang secara terpusat. Secara logika, arah pembangunan sudah menuju pembangunan sumber daya manusia, tetapi kompas pelaksanaan program prioritas tidak jelas sejak awal. Alih-alih membenahi tata kelola, struktur kelembagaan justru membengkokkan dan pola teknokratis tergeser dalam proses perencanaan pembangunan di tingkat nasional maupun subnasional. Ia juga menilai program-program pembangunan saling kontraproduktif, misalnya komitmen menangani krisis iklim yang berjalan bersamaan dengan menggencarkan hilirisasi nikel.

Menurut Yanuar, program prioritas selama ini masih berfokus pada indikator input, seperti jumlah koperasi yang didirikan dan porsi menu MBG yang dibagikan, bukan pada indikator outcome. Karena itu, theory of change program prioritas harus dinyatakan secara jelas dan eksplisit, termasuk dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025-2029. Ia menilai Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) 2025-2045 keluar jalur dari semangat tersebut. Dalam hal ini, jangka panjang koherensi dan dampak harus menjadi tujuan utama. Yanuar menyebut tiga uji koherensi program, yaitu koherensi fiskal, koherensi program, dan koherensi temporal, serta lima dimensi kapasitas negara yang wajib dipenuhi: regulasi, kelembagaan, akuntabilitas, perencanaan, dan implementasi. Ia menilai kapasitas regulasi Indonesia cukup kuat, tetapi lemah dalam akuntabilitas dan implementasi, ditambah koordinasi antarkementerian yang belum baik, dampak pemotongan anggaran terhadap program, dan sistem manajemen data yang bermasalah. Sebagai bukti, program MBG berjalan tanpa regulasi yang mendahuluinya, termasuk tanpa pelibatan Kementerian Kesehatan dan BPOM dalam pengawasannya.

Yanuar mengapresiasi catatan TII yang telah mencakup lima aspek penilaian efektivitas program prioritas, yaitu keamanan, ketepatan, keterukuran, keterbukaan, dan keadilan proses distribusi. Ia menyayangkan

penetapan program prioritas yang terburu-buru diperluas sebelum uji coba dilaksanakan. Karena itu, perlu ada evaluasi independen sebelum perluasan program, sistem pengaduan bagi publik, dan transparansi status tindak lanjut aduan masyarakat. Ia menekankan tiga indikator prioritas: pengukuran dampak gizi dari MBG, pemulihan agensi daerah di tengah pemotongan TKD, dan jaminan akuntabilitas aparat dalam menindaklanjuti kasus yang dilaporkan.

DISKUSI

Dalam sesi diskusi, peserta menanyakan kepada Jaleswari cara yang efektif untuk melawan menguatnya militerisasi dan otoritarianisme, termasuk di tubuh kepolisian, yang dijustifikasi dengan berbagai alasan seperti perbantuan, di tengah DPR yang lemah dan konformitas politisi menjelang 2029. Jaleswari menekankan pentingnya jaringan dan kolektivitas masyarakat sipil: bersuara, berjejaring, dan menyatukan satu gerakan dengan gerakan lainnya, alih-alih bekerja sendiri-sendiri. Ia mencatat bahwa pemerintah saat ini tampak kurang responsif terhadap masukan masyarakat sipil, tetapi masih ada ruang untuk bekerja melalui saluran birokrasi dan memanfaatkan lembaga seperti Mahkamah Konstitusi. Kolektivitas inilah yang harus diperkuat agar hasil evaluasi masyarakat sipil terus dirawat hingga ditindaklanjuti pemerintah. Kita tidak boleh berhenti mengevaluasi dan mengoreksi mekanisme pemerintah yang ada. Ia juga mengajak masyarakat sipil terus berisik mengenai konfigurasi skema program prioritas agar tetap akuntabel dan melindungi kelompok rentan.

Moderator dan Jaleswari juga membahas tantangan dan kritik yang dihadapi gerakan masyarakat sipil, terutama soal efektivitas dan tindak lanjutnya. Jaleswari mengingatkan pentingnya pengawalan agenda demokrasi menjelang 2029, termasuk revisi undang-undang pemilihan umum yang perlu dituntaskan paling lambat awal 2027.

Peserta lain menanyakan kepada Yanuar prioritas pembenahan pembiayaan negara di luar pajak dan investasi, di tengah efisiensi anggaran yang dinilai tidak efisien akibat Proyek Strategis Nasional (PSN) dan pemerintahan yang makin gemuk. Peserta juga bertanya apakah daerah mungkin melawan pusat karena tekanan anggaran dan limpahan tanggung jawab tanpa sumber daya, serta seberapa lama anggaran yang ada dapat bertahan. Yanuar menyoroti bahwa belanja pemerintah sangat terfokus pada sektor yang kurang produktif dan tidak memberi kepastian hukum bagi pelaku ekonomi. Ia juga menyinggung persoalan restitusi pajak, subsidi, dan program kuasi-fiskal yang bebannya tidak dapat dilunasi, serta memperkirakan pemerintah masih dapat bertahan secara finansial hingga 2029. Ia kembali menyoroti pentingnya alokasi anggaran untuk menyuntik inovasi di akar rumput, termasuk mendorong riset yang dibutuhkan untuk perbaikan tata kelola, agar Indonesia memiliki imajinasi tentang arah yang dituju. Ia juga menekankan perlunya pertumbuhan yang adil bagi semua sektor, ruang fiskal yang lebih longgar, dan keterlibatan masyarakat sipil.

Terkait cara menyampaikan temuan kepada pemerintah, Yanuar menyarankan agar tulisan TII disederhanakan menjadi sekitar tiga halaman untuk dibagikan kepada pemangku kepentingan di pemerintahan. Ia juga menyarankan pertemuan langsung dengan menteri atau pejabat eselon terkait, bukan sekadar seminar, agar rekomendasi lebih mudah diterima dan tidak menimbulkan resistensi. Mengenai hubungan masyarakat sipil dan negara, ia menekankan perlunya inisiatif dari masyarakat serta pergeseran cara pandang dari memandang pemerintah sebagai penguasa menjadi pelayan publik.

Pada penutup, Yanuar menekankan bahwa tidak semua lini pembangunan harus ditangani oleh pemerintah, dan bahwa pola sentralisasi dan militerisasi harus dihentikan agar tidak semakin merampas hak hidup dan kesejahteraan masyarakat. Putu mengingatkan agar kita tidak berhenti bersuara untuk memperbaiki situasi yang kini bergejolak dan tidak sesuai dengan amanat regulasi, demi membangun Indonesia yang lebih sejahtera. Jaleswari menutup dengan penegasan bahwa masyarakat sipil harus terus berisik agar program-program prioritas tetap akuntabel dan melindungi kelompok rentan, serta bahwa militer tidak boleh merampas ruang publik.

Catatan :

1. **Rangkuman dan Materi Presentasi THE INDONESIAN FORUM dapat diakses di <http://www.theindonesianinstitute.com/index.php/kegiatan/the-indonesian-forum>**
2. **Materi dapat digunakan untuk publikasi atau keperluan lainnya dengan menyebutkan sumber informasi dari “The Indonesian Forum yang diselenggarakan oleh The Indonesian Institute”.**

TERIMA KASIH ~